

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era kontemporer, isu krisis pangan masih menjadi permasalahan pokok yang penting untuk dapat segera ditangani. Menurut laporan Global Report on Food Crisis pada tahun 2021 terdapat 53 negara dengan total jumlah 193 juta orang menghadapi kerawanan pangan akut. Namun 570.000 orang di empat negara berpotensi menghadapi kerawanan pangan pada kondisi yang lebih buruk, yaitu Ethiopia, Sudan Selatan, Yaman dan Madagaskar. Ethiopia menjadi negara yang berada pada fase *catastrophe* tertinggi di dunia dengan jumlah penduduk terdampak berjumlah 401.000 orang (Global Report on Food Crises, 2022).

Ethiopia merupakan negara Republik Demokratik Federal yang dikenal sebagai Tanduk Afrika, terletak di bagian Timur Laut Afrika. Sepanjang sejarahnya, Ethiopia mengalami krisis pangan akibat perubahan iklim ekstrim, kekeringan, wabah penyakit seperti COVID-19, campak, malaria, dan kolera, dan konflik yang terus berulang (Goddard, 2024). Krisis yang datang berkali-kali telah membuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi efek krisis semakin melemah. Tingkat kekurangan gizi yang tinggi, wabah penyakit dan kelangkaan air membuat situasi kerawanan pangan di Ethiopia semakin memburuk, hal ini membuat jutaan orang bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk dapat bertahan hidup (World Food Programme, n.d.).

Krisis pangan yang terjadi di Ethiopia pada rentang tahun 2020 hingga 2024 diperparah oleh konflik antara Pemerintah Ethiopia dengan *Tigray People's Liberation Front* pada tahun 2020. Dampak dari konflik di Ethiopia menyebabkan

masyarakat kesulitan dalam mengakses obat-obatan dan sumber makanan yang membuat status krisis pangan di Ethiopia semakin parah (Pragilaksono, 2022). Malnutrisi juga menjadi penyebab status krisis pangan di Ethiopia semakin parah, dimana pada tahun 2021 lebih dari 4.2 juta anak dibawah usia lima tahun terancam malnutrisi, dengan 1 juta anak diantaranya berada pada kondisi yang lebih berat (Global Report on Food Crises, 2022). Pandemi COVID-19 juga menjadi pendorong meningkatnya kerawanan pangan pada tahun 2021-2022. Pandemi COVID-19 membuat kondisi ekonomi makro di Ethiopia memburuk penyebab utamanya adalah penurunan ekspor, cadangan devisa rendah, belanja militer dan hutang negara yang besar. Hal ini membuat produk industri terganggu dan menyebabkan Ethiopia mengalami inflasi pangan yang menyebabkan terkendalanya akses pangan bagi masyarakat rentan di seluruh negeri (Global Report on Food Crises, 2022).

Berdasarkan data dari Integrated Food Security Phase, kerawanan pangan di Ethiopia pada tahun 2021 berada pada kondisi yang lebih buruk yaitu fase 3-5 dibandingkan dengan negara di Afrika Timur. Pada tahun 2021 lebih dari 16 juta penduduk Ethiopia menderita kerawanan pangan yang berada pada fase IPC 3-5 (Global Report on Food Crises, 2022). Jumlah penduduk yang mengalami kerawanan meningkat sejak tahun 2020, dimana Belg dan Meher menjadi wilayah dengan populasi tertinggi yang berada pada fase IPC 3-5 berdasarkan catatan IPC di Ethiopia. Sementara, jumlah populasi yang mengalami fase IPC 5 berada di Tigray dengan jumlah 353.000 orang, menjadi angka tertinggi sejak kelaparan di Somalia tahun 2011 (Global Report on Food Crises, 2022). Untuk mempermudah analisa situasi krisis pangan di Ethiopia, data dari tahun 2021 dapat dilihat dari gambar grafik berikut.



Tabel 1.1 Jumlah Kerawanan Pangan

Sumber: diolah penulis (Annual Country Report WFP)

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 jumlah populasi yang terancam kerawanan pangan berjumlah lebih dari 11 juta orang (World Food Programme, 2020). Tingkat populasi yang terancam kerawanan pangan naik drastis pada tahun 2021-2022 hal ini dikarenakan adanya konflik dan pandemi COVID-19. Berdasarkan Annual Country Report WFP Pada tahun 2021 terdapat lebih dari 18 juta orang yang terancam kerawanan pangan, pada tahun 2022 jumlahnya semakin meningkat hingga lebih dari 22 juta orang (World Food Programme, 2022b). Namun pada tahun 2023 dan 2024 setelah pandemi dan konflik berakhir, jumlah populasi yang terancam kerawanan pangan turun hingga 15 juta orang (World Food Programme, 2023b).

Melihat dari berbagai kejadian tersebut, bantuan pihak eksternal seperti organisasi internasional diperlukan dalam upaya membantu mengatasi krisis pangan. WFP telah hadir di Ethiopia sejak tahun 1968, hadirnya WFP bertujuan untuk membantu Ethiopia menyelesaikan masalah krisis pangan yang berkepanjangan (World Food Programme, 2017). WFP telah rutin melakukan pengiriman bantuan pangan ke Ethiopia sejak Ethiopia mengalami rangkaian krisis pangan dan bencana

alam pada tahun 1983 sampai saat ini dengan bantuan logistik dan program bantuan tunai. Tidak hanya itu WFP juga melakukan berbagai kerjasama agar mendapat donor dan bantuan dana untuk memenuhi dapat kebutuhan masyarakat Ethiopia, terutama kelompok rentan. Hal tersebut menunjukkan komitmen UNWFP yang konsisten dalam memberikan bantuan ke Ethiopia.

Namun dana yang terbatas sering menjadi penghambat bagi WFP dalam melakukan pendistribusian bantuan, penyebab keterbatasan dana adalah meningkatnya populasi yang berada dalam situasi rentan. Pada tahun 2020 jumlah populasi yang berada dalam situasi rentan berjumlah 11.8 juta orang (World Food Programme, 2020). Pada tahun 2021 jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 18 juta orang pada akhir tahun dan pada tahun 2022 semakin meningkat menjadi 22.6 juta orang (World Food Programme, 2022b). Pada tahun 2023 angka populasi yang mengalami kerawanan pangan turun menjadi 15.4 juta di akhir tahun (World Food Programme, 2023b). Hal tersebut berbanding terbalik dengan bantuan yang diberikan oleh WFP, meskipun jumlah rata-rata populasi yang membutuhkan bantuan sebesar 16 juta orang, namun WFP hanya dapat memberikan bantuan kepada 10 juta orang akibat dana yang terbatas (World Food Programme, 2022b).

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait dengan triple nexus antara lain adalah penelitian oleh Hasudungan dan Puteri. Hasudungan (2021) meneliti “Implementasi Konsep Triple Nexus Dalam Upaya Membangun Perdamaian (Peace Building) Setelah Konflik Ambon-Maluku” oleh UNDP dengan melibatkan lembaga nasional dan lokal Maluku (Hasudungan, 2021). Kemudian Puteri (2024) meneliti “Mitigasi Dampak Krisis Politik dan Bencana Alam Haiti Menggunakan Triple Nexus Approach Melalui USAID Water and Sanitation (WATSAN) 2017-2023”. Penelitian

ini menjelaskan implementasi pendekatan triple nexus yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui program WATSAN di Haiti (Puteri, 2024). Kedua penelitian tersebut membantu penulis untuk memahami triple nexus dari sebuah studi kasus.

Kemudian, penulis menggunakan satu studi sebagai referensi World Food Programme. Zada (2025) meneliti “Peran *World Food Programme* Dalam Mengatasi Krisis Pangan di Yaman Pada Tahun 2020-2022”. Penelitian ini menjelaskan mengenai peran WFP dalam mengatasi krisis pangan di Yaman tahun 2020-2022 dengan menggunakan pendekatan normatif dan manajemen dari konsep implementasi organisasi internasional oleh Joachim, Reinalda & Verbeek (Zada, 2025). Berdasarkan tiga penelitian terdahulu, maka terdapat celah penelitian, yaitu analisis bantuan oleh UNWFP melalui program *Zero Hunger* dengan menggunakan pendekatan Triple Nexus yang dalam penelitian ini menggunakan studi kasus di Ethiopia pada tahun 2020-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi program *Zero Hunger* World Food Programme dalam mengatasi krisis pangan di Ethiopia pada tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan

1.3.1 Secara Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah skripsi di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

1.3.2 Secara Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari program zero hunger yang dilakukan WFP dalam mengatasi krisis pangan di Ethiopia pada tahun 2020-2024, menggunakan Pendekatan *Triple Nexus*.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Krisis Pangan

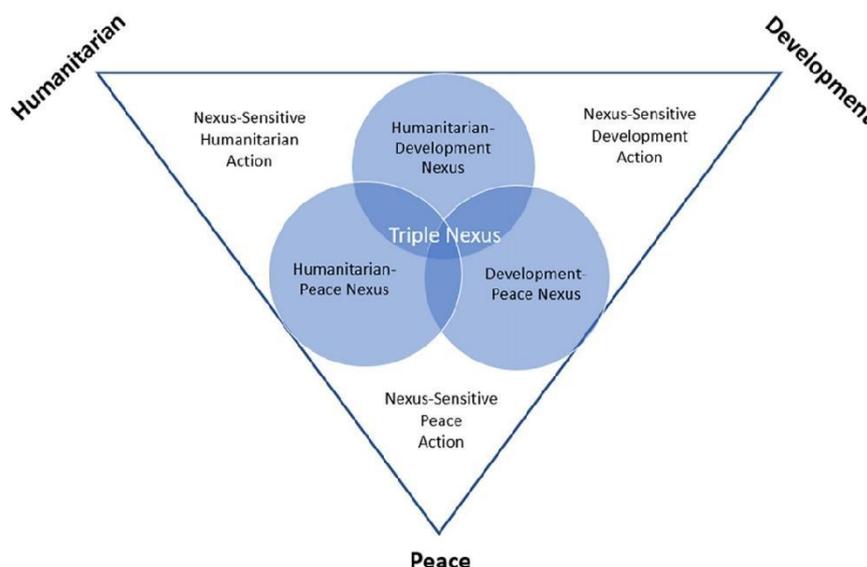
Krisis pangan merupakan keadaan dimana akses pangan yang cukup, bergizi dan aman tidak dapat terpenuhi dalam jangka waktu tertentu. Krisis pangan memiliki berbagai tingkat keparahan, mulai dari sumber pangan yang berkurang sebagian hingga kehabisan sumber pangan (Yudhistira, E., Bachmid, S. S., & Arisanto, 2024). Kebutuhan akan pangan menjadi hal utama bagi setiap negara di dunia, dimana negara menjalin kerjasama dengan negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Namun semakin tingginya populasi penduduk di zaman sekarang telah mempengaruhi permintaan pangan, dimana sumber pangan yang terus menerus diambil membuat sumber pangan tersebut habis (Yudhistira, E., Bachmid, S. S., & Arisanto, 2024).

Pendekatan *Triple Nexus* dalam menangani krisis pangan, dengan menggabungkan bantuan kemanusiaan dengan pembangunan untuk meningkatkan akses gizi, meskipun aspek perdamaian lebih ke arah teoritis, namun inisiatif tersebut harus dievaluasi untuk melihat kontribusi pada tujuan nexus yang lebih luas (C. P. Volkdal, 2024).

1.4.2 Triple Nexus Approach

Triple Nexus Approach merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan keterkaitan dan hubungan antara bidang kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian. Pendekatan *Triple Nexus* terdiri dari komponen

humanitarian, development, dan peace, ketiga komponen ini dianggap dapat menjadi cara baru dalam bekerja, terutama dalam menghadapi kerentanan (Howe, 2019). Pada dasarnya krisis kemanusiaan diakibatkan oleh berbagai faktor, namun krisis dan peningkatan konflik yang berlarut-larut dapat membuat pemenuhan kebutuhan orang-orang yang sudah rentan tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu aktor-aktor kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian harus saling bekerja sama untuk dapat mengatasi penyebab kerentanan sembari memenuhi kebutuhan kemanusiaan, mendukung ketahanan dan pembangunan jangka panjang (Howe, 2019).



Gambar 1.1 Triple Nexus Approach

Sumber: (Howe, 2019)

Pendekatan *Triple Nexus* terdiri atas tiga komponen yaitu, kemanusiaan, perdamaian, dan pembangunan. Komponen kemanusiaan merupakan suatu intervensi darurat yang dilakukan dengan cepat tanggap dengan memberikan bantuan sesegera mungkin untuk dapat menyelamatkan nyawa sebagai respon darurat dalam melindungi masyarakat yang terdampak dalam situasi kritis. Bantuan yang diberikan biasanya terfokus pada kebutuhan yang mendesak seperti makanan, air bersih,

perawatan kesehatan dan tempat berteduh sekaligus tempat berlindung (C. Volkdal, 2024). Dapat dikatakan komponen ini beroperasi dalam jangka pendek. Dalam jurnalnya (Howe, 2019) menjelaskan hasil komponen kemanusiaan dapat diukur melalui indikator skor konsumsi makanan sebagai indikasi perubahan situasi kemanusiaan selama musim kelaparan terjadi, dimana jika skor konsumsi makanan semakin tinggi maka tingkat krisis pangan semakin rendah.

Selanjutnya komponen pembangunan, komponen ini bertujuan untuk mengatasi kerentanan yang berfokus dengan tujuan jangka panjang. Komponen ini tidak mengukur pembangunan berdasarkan indikator ekonomi saja, melainkan juga berdasar pada kemampuan individu dalam menjalani hidup secara sejahtera. Komponen ini memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpaku pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada infrastruktur yang dapat membangun stabilitas jangka panjang, kesehatan dan pendidikan. Membekali masyarakat dengan keterampilan penting untuk dilakukan agar dapat mendukung pengembangan masyarakat lokal dan dapat membuat masyarakat bangkit dari dampak konflik dan menciptakan pemulihan yang berkelanjutan (Howe, 2019). Dalam jurnalnya (Howe, 2019) menjelaskan hasil komponen pembangunan dapat diukur melalui indikator skor aset komunitas yang juga melibatkan petani kecil, pekerja pabrik dan transporter lokal ataupun dikaitkan dengan *second change for measurement* seperti indikator SDGs 16.6.2 Proporsi penduduk yang puas dengan pengalaman terakhir mereka terhadap pelayanan publik.

Terakhir, merupakan komponen perdamaian, komponen ini bertujuan untuk mengatasi penyebab konflik dan membangun ketahanan. Konsep ini mengintegrasikan komponen pembangunan dan kemanusiaan dengan perdamaian

dengan menjelaskan bahwa pendekatan yang tepat dalam menatap konflik dengan melakukan pembangunan ulang dan pemberian bantuan darurat dapat mencegah kekerasan muncul kembali (C. Volkdal, 2024). Ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lain. Pendekatan *Triple Nexus* berupaya untuk menyelaraskan ketiga komponen tersebut, dengan penyelarasan tersebut pendekatan *Triple Nexus* bertujuan untuk mengatasi penyebab krisis dan mendorong terciptanya solusi yang efektif, berkelanjutan, dan berjangka panjang. Dalam jurnalnya (Howe, 2019) menjelaskan hasil komponen perdamaian dapat diukur melalui indikator skor persepsi ketegangan komunitas ataupun dikaitkan dengan *second change for measurement* seperti SDGs 16.1.3 Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikologis dan (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir dan SDGs 16.1.4 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di sekitar tempat tinggal mereka. Skor persepsi ketegangan komunitas merujuk pada persepsi masyarakat tentang konflik yang terjadi. Untuk mengukur kontribusi terhadap perdamaian, dihitung dengan melibatkan masyarakat yang terdampak konflik, semakin tinggi persepsi masyarakat terhadap konflik maka tingkat ketegangan semakin tinggi.

Pada gambar diatas area lingkaran yang saling berpotongan disebut dengan *Triple Nexus*, yaitu lingkaran-lingkaran dengan komponen kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian yang saling terhubung. Suatu upaya dapat dikatakan sebagai *Triple Nexus* apabila upaya tersebut telah memenuhi atau saling berkaitan pada dua hingga tiga komponen *Triple Nexus*. Misalnya upaya perdamaian pada awalnya tidak mempromosikan kemanusiaan dan pembangunan, namun upaya tersebut ternyata juga dapat berkontribusi dan saling berkaitan dengan dua hingga tiga

komponen lainnya secara tidak langsung (Howe, 2019). Dalam hal ini juga dapat disebut dengan *double nexus*, yaitu sebagai berikut:

1.4.1.1 Humanitarian-Peace Nexus

Double nexus ini, merupakan persilangan antara kemanusiaan dengan perdamaian, contoh penerapan dari *double nexus* ini menurut (Howe, 2019) adalah *ceasefire distribution*. Dalam jurnalnya Howe menjelaskan, praktik dari *double nexus* ini digambarkan dengan upaya memperluas respons kemanusiaan selama gencatan senjata (Howe, 2019). Gencatan senjata yang disepakati dapat memberikan akses bantuan kemanusiaan untuk masuk ke wilayah yang terdampak konflik. Dengan menunjukkan manfaat dan nilai dari gencatan senjata, maka dapat menciptakan peluang yang besar untuk tercapainya perdamaian. Upaya perdamaian ini juga membuka peluang untuk meredam konflik tidak timbul lagi melalui dampak atau efek dari bantuan yang diberikan (Howe, 2019).

1.4.2.2 Development-Peace Nexus

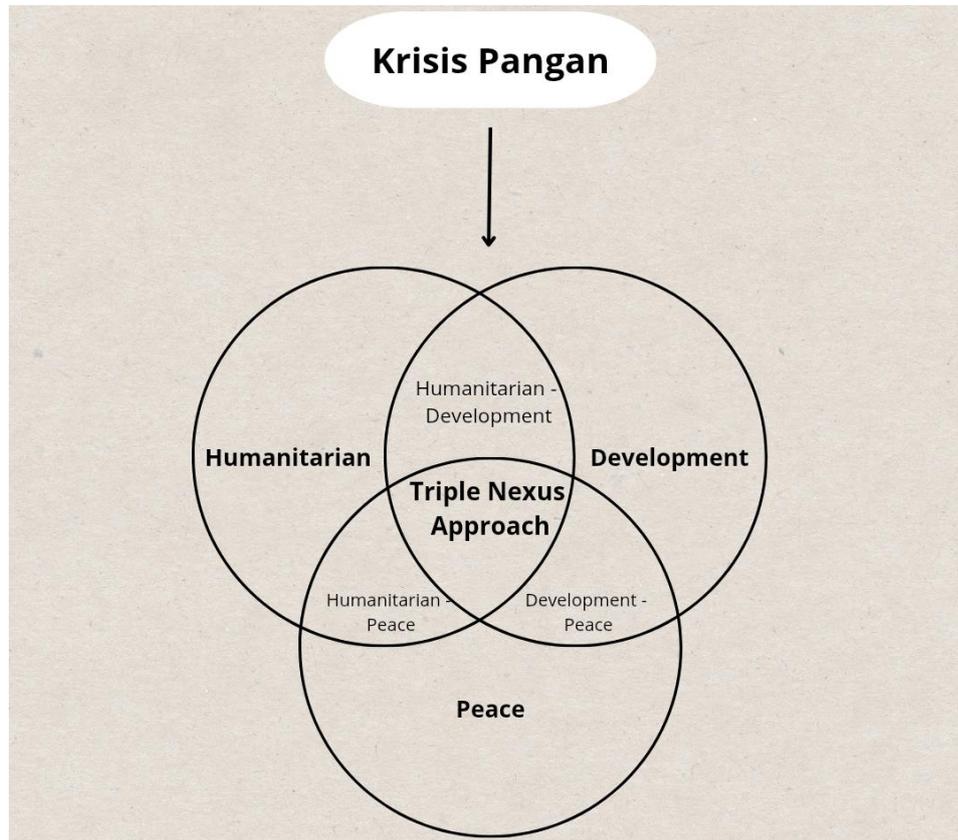
Double nexus ini merupakan persilangan antara pembangunan dengan perdamaian, contoh penerapan dari *double nexus* ini menurut (Howe, 2019) adalah *school meals*. Dalam jurnalnya Howe menjelaskan, praktik dari program *school meals* termasuk komponen pembangunan karena dapat mempertahankan dan menarik anak-anak ke sekolah dan berpotensi meningkatkan hasil pembelajaran. Pendidikan juga dapat berkontribusi pada perdamaian, dengan penyediaan makanan sekolah dapat menciptakan rasa normal bagi anak-anak setelah konflik berlangsung. Terlebih jika program makanan sekolah juga dikombinasikan dengan pelajaran seputar kewarganegaraan dapat membantu mengurangi ketegangan pada generasi muda (Howe, 2019). Nexus ini juga menjelaskan pentingnya untuk mencari akar

permasalahan suatu konflik, karena setelah perdamaian tercipta maka pembangunan yang berkelanjutan dapat kembali dilakukan (Howe, 2019).

1.4.2.3 Humanitarian-Development Nexus

Double nexus ini merupakan persilangan antara kemanusiaan dengan pembangunan contoh penerapan dari *double nexus* ini menurut (Howe, 2019) adalah *flood resilience*. Dalam jurnalnya Howe menjelaskan, praktik dari *double nexus* ini adalah dari bendungan tersebut masyarakat dapat memiliki akses terhadap air dan pengendalian aliran air yang baik sepanjang tahun. Daerah yang mengalami kekeringan sebelumnya juga dapat menanam kacang-kacangan dan pohon buah yang dapat menjadi sumber penghasilan sebagai *output* pembangunan (Howe, 2019). Bendungan tersebut juga dapat mencegah kerusakan dan krisis akibat banjir bandang yang sering terjadi sebagai *output* kemanusiaan. Nexus ini bertujuan untuk memastikan bahwa upaya kemanusiaan dapat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan yang responsif terhadap kebutuhan manusia yang mendesak. Nexus ini menekankan pentingnya untuk mendorong upaya pembangunan jangka panjang dan pemenuhan kebutuhan manusia yang mendesak (Howe, 2019).

1.5 Sintesa Pemikiran



Sumber: (Howe, 2019)

Berdasarkan sintesa pemikiran diatas, peneliti akan menjelaskan bagaimana upaya mengatasi krisis pangan di Ethiopia dengan menggunakan pendekatan *Triple Nexus*. Peneliti akan mendeskripsikan, menganalisis, dan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan dalam program bantuan pangan berdasarkan *Triple Nexus* yang terdiri dari tiga komponen, yaitu kemanusiaan, perdamaian, dan pembangunan. Dalam analisis ini peneliti akan menjelaskan keterkaitan antara upaya kemanusiaan, perdamaian, dan pembangunan. Penggunaan *Triple Nexus Approach* dalam upaya mengatasi krisis pangan melalui program bantuan pangan dapat memberikan pemahaman bagaimana komponen kemanusiaan, perdamaian, dan pembangunan

dapat berkontribusi dan saling berkaitan dalam membantu kelangsungan hidup masyarakat.

1.6 Argumen Utama

Program *Zero Hunger* mendukung dan mencakup peningkatan dalam upaya kemanusiaan, perdamaian, dan pembangunan, sehingga dapat berkontribusi terhadap masyarakat yang terdampak krisis di Ethiopia. Upaya yang termasuk dalam *double nexus* (1) *Humanitarian-Development Nexus* yakni, *Productive Safety Net Program*. Program ini termasuk dalam *Ethiopia Country Strategic Plan* yang dimulai tahun 2020 dan diinisiasi oleh Pemerintah Ethiopia. Bentuk dari program ini adalah memberi bantuan dalam bentuk pangan dan tunai sebagai bentuk *Humanitarian*-nya. Program ini juga meningkatkan akses sumber daya terhadap pengelolaan air, pertanian, dan pelatihan keterampilan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengatasi krisis dalam jangka panjang sebagai bentuk *Development*-nya. Kemudian dalam *double nexus* (2) *Development-Peace Nexus* yakni *School Meals*. Program *school meals* termasuk dalam *Ethiopia Country Strategic Plan* yang dimulai pada tahun 2020 dan diinisiasi oleh WFP yang bekerja sama dengan Pemerintah Ethiopia dan berbagai mitra. Bentuk dari program ini adalah penyediaan makanan bergizi di sekolah. Dari program ini, dapat menarik anak-anak kembali ke sekolah untuk belajar yang kemudian dapat meningkatkan kemampuan belajar mereka, yang dapat berguna untuk masa depan mereka sebagai bentuk *Development*. Program ini juga berkontribusi pada *Peace*, kembali dibukanya kelas-kelas dapat menciptakan rasa aman dan kenormalan dalam hidup mereka baik selama konflik ataupun setelah konflik, yang dapat meredakan ketegangan saat konflik terjadi.

Dalam *double nexus* (3) *Humanitarian-Peace Nexus* yakni *Rural Resillience Initiative* (R4) dan *System for Integrated Index Insurance and Risk Reduction* (SIIFE). *Double Nexus* ini mengikuti perkembangan program R4 yang dilakukan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan mereka dalam menghadapi resiko perubahan iklim dan program SIIFE yang mengembangkan pendekatan perlindungan aset, untuk memungkinkan penggembala dapat menjaga hewan ternak mereka tetap hidup. Upaya memberikan asuransi cuaca dalam program R4 dan SIIFE merupakan bentuk Humanitarian. WFP kemudian melakukan pendampingan kepada masyarakat dan staf pemerintahan mengenai ketahanan pangan agar dapat membentuk sistem masyarakat yang lebih tangguh agar dapat bertahan dari krisis yang berkelanjutan. Yang kemudian dapat mendukung terjadinya upaya perdamaian melihat dari upaya dan manfaat dari bantuan tersebut sebagai bentuk *Peace*. Ketiga upaya tersebut saling berhubungan, sehingga membentuk nexus yang mengaitkan komponen kemanusiaan, perdamaian, dan pembangunan yang dapat mewujudkan kesejahteraan, perdamaian, keamanan dan mendukung kelangsungan hidup masyarakat di Ethiopia.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Agar dapat memetakan peran WFP, penulis akan menggunakan tipe penelitian deskriptif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara lebih detail (Rahmadi, 2011). Tipe penelitian ini digunakan dalam penelitian ini guna menggambarkan dengan jelas bagaimana upaya WFP dalam mengatasi krisis pangan

di Ethiopia melalui program zero hunger pada tahun 2020-2024 dengan menggunakan Pendekatan Triple Nexus.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Peneliti memberi batas waktu penelitian pada tahun 2020-2024 berdasarkan Country Strategic Plan yang dibuat oleh WFP di Ethiopia. Pemilihan tahun 2020 dikarenakan tahun tersebut merupakan awal mula pelaksanaan Country Strategic Plan. Dengan demikian penelitian ini dibatasi pada tahun 2024 karena data terakhir yang didapat peneliti yaitu tahun 2024.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian yaitu data primer (langsung) dan data sekunder (tidak langsung), dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, dimana peneliti dapat mengkaji dan mengolah data tanpa perlu melakukan observasi langsung di lapangan, karena sumber data diperoleh dari sumber kedua (Rahmadi, 2011). Setidaknya terdapat enam pendekatan untuk mendapatkan data dari penelitian kualitatif, seperti wawancara, observasi, angket, dokumenter, penelusuran data online dan instrumen pengumpul/penggali data (Rahmadi, 2011). Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data online dimana data didapat dari berbagai dokumen online seperti, buku, jurnal, publikasi, internet, berita, dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Menurut William dalam (Moleong, 1990) Teknik ini digunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, dan menggambarkan data-data yang telah dikumpulkan. Bogdan dan Biklen (1982) menjelaskan peneliti mencari dan menyusun data secara sistematis,

sehingga penelitian ini dapat disederhanakan agar mudah dipahami dan hasil ataupun temuan yang ada dapat diteruskan kepada orang lain. Teknik ini digunakan untuk menjelaskan mengenai upaya-upaya mengatasi krisis pangan di Ethiopia yang dilakukan oleh WFP dalam program *zero hunger* tahun 2020-2024.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian “Analisa Program *Zero Hunger* World Food Programme (WFP) Dalam Mengatasi Krisis Pangan di Ethiopia Tahun 2020-2024”, peneliti membagi sistematika penulisan skripsi ke dalam empat bab, diantaranya:

Bab I. Pada bab 1 ini, peneliti ingin memberikan gambaran mengenai permasalahan krisis pangan yang terjadi di Ethiopia, peneliti juga akan menjelaskan mengapa Ethiopia menjadi negara yang terkena permasalahan krisis pangan, kemudian berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, sintesa pemikiran, argumen utama, metodologi penelitian, dan tinjauan pustaka.

Bab II. Pada bab 2 ini, penulis akan menjelaskan *humanitarian-development nexus* dari implementasi program bantuan pangan UN WFP dalam mengatasi krisis pangan di Ethiopia pada tahun 2020-2024

Bab III. Pada bab 3 ini, penulis akan menjelaskan *humanitarian-peace nexus*, dan *development-peace nexus* dari implementasi program bantuan pangan UN WFP dalam mengatasi krisis pangan di Ethiopia pada tahun 2020-2024.

Bab IV. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.